

Penyebab Instabilitas Ekonomi-Politik di Negara-negara Kepulauan Akibat Pandemi Covid-19: Studi Kasus Maladewa dan Kepulauan Bahama

Kurnia Zulhandayani Rizki¹, Namira Risqi Putri Muquita¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
kurniazulhandayani@unram.ac.id

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had a multi-sectoral impact which encourages economic weakening and carries political instability. In this case, developing countries are affected massively by the pandemic. Vulnerable economic stability and unstable government management have made it difficult for the country to adapt to the restrictions imposed during the pandemic. Especially the archipelagic countries that rely on natural tourism as their mainstay destination. Archipelago countries which depend on tourism and experience economic contraction along with political instability are the Maldives and the Bahamas. The existence of this phenomenon prompts this research to discuss about the reasons for the emergence of political-economic instability due to the Covid-19 pandemic in the Maldives and the Bahamas. The method used in this research is descriptive qualitative with a cross-sectional approach, namely the Covid-19 pandemic era. Furthermore, this research uses library research techniques to obtain the required data. Therefore, it can be concluded that the dependence on the tourism sector as the largest income encourages the Maldives and the Bahamas to have immature coping mechanisms in dealing with the Covid-19 pandemic crisis. This led to the emergence of political-economic instability in both countries.

Keywords: Archipelagic State; Bahamas Islands; Covid-19 Pandemic; Maldives.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak multi-sektoral yang mendorong melemahnya ekonomi hingga mengganggu stabilitas politik negara. Dalam hal ini, negara-negara berkembang merupakan objek yang terdampak pandemi cukup masif. Stabilitas ekonomi yang rentan dan manajemen pemerintahan yang goyah mendorong negara kesulitan beradaptasi dengan pembatasan yang diberlakukan selama pandemi. Terutama negara-negara kepulauan yang mengandalkan wisata alam sebagai destinasi andalannya. Negara-negara kepulauan yang bergantung pada pariwisata dan mengalami kontraksi ekonomi dan instabilitas politik antara lain yaitu Maladewa dan Kepulauan Bahama. Adanya fenomena tersebut mendorong penelitian ini untuk mengangkat mengenai alasan munculnya instabilitas ekonomi-politik akibat Pandemi Covid-19 di Maladewa dan Kepulauan Bahama. Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan *cross-sectional* yakni masa Pandemi Covid-19. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa adanya ketergantungan terhadap sektor pariwisata sebagai pemasukan terbesar mendorong Maladewa dan Kepulauan Bahama memiliki *coping mechanism* yang tidak matang dalam menghadapi krisis Pandemi Covid-19. Hal tersebut menyebabkan munculnya instabilitas ekonomi-politik di kedua negara.

Keywords: Kepulauan Bahama; Maladewa; Negara Kepulauan; Pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Kemunculan virus baru yang menyerang pernapasan menggegerkan Tiongkok pada akhir 2019. Bencana ini kemudian menjadi kekhawatiran dunia sejak merebak dan dinyatakan sebagai pandemi pada awal 2020. Baik negara-negara Asia bahkan di benua Eropa mengalami permasalahan serupa dalam penanganan pandemi. Akan tetapi, IMF (*International Monetary Fund*) telah memprediksi kontraksi ekonomi negara-negara berkembang akan lebih besar setelah dilanda pandemi. Maka potensi resesi juga akan lebih besar. Sektor perekonomian memang menjadi sasaran utama dari berbagai pembatasan yang dilakukan akibat pandemi. Larangan bepergian di taraf internasional hingga aturan ketat karantina pada level domestik, mendorong melemahnya berbagai sektor yang melibatkan interaksi langsung.

Akibat melemahnya ekonomi nasional, maka ekonomi global pun turut terdampak. Penurunan ekspor dan impor serta aktivitas perdagangan internasional menghambat berbagai kegiatan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik dunia. Arah kebijakan yang beralih isu-isu kesehatan mendorong pergeseran dalam arah ekonomi serta politik di dunia. Negara-negara besar berlomba-lomba mengembangkan vaksinnya masing-masing, mulai dari Jerman hingga Rusia. Bahkan negara berkembang seperti Kuba dengan pemimpinnya yang nasionalis memilih mengembangkan vaksinnya sendiri dengan tiga dosis minimal, di saat vaksinasi lainnya memberi persyaratan dua dosis maksimal. Perubahan arah kebijakan ekonomi dan politik juga terlihat dengan adanya jual-beli vaksin serta dilontarkan berbagai isu mengenai vaksinasi di seluruh dunia, bahkan muncul istilah *vaccine diplomacy*. Sehingga dapat dilihat dampak pandemi yang bersifat multi-sektoral menjadikan perubahan ke arah kehidupan dengan tatanan baru, *new normal*.

Hal tersebut dirasakan pula di negara-negara kepulauan yang terkesan “terisolasi” dari pengaruh luar. Bahkan beberapa negara kepulauan mengalami kontraksi perekonomian yang cukup hebat. Selain itu, defisit pada neraca pembayarannya juga mendorongnya meminta bantuan asing untuk memulihkan ekonominya. Pemberlakuan pembatasan juga berdampak hebat kepada negara-negara kepulauan, terutama dengan mobilisasi domestik ataupun internasional yang menjadi sumber perputaran ekonomi nasional. Negara-negara kepulauan yang diberkahi dengan keindahan alam tentunya mengandalkan sektor pariwisata untuk menggerakkan ekonominya, namun pandemi mendorong penurunan jumlah wisatawan hingga kegagalan untuk mencapai target di bidang pariwisata. Sehingga berbagai kebijakan harus ditinjau ulang dan diubah sesuai dengan kondisi terkini. Di samping itu, perusahaan-perusahaan juga harus memotong anggaran-anggaran yang dirasa tidak penting atau bahkan memberhentikan pegawai-pegawainya. Hal ini berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi-politik.

Adapun dalam hal ini, Maladewa dan Kepulauan Bahama merupakan dua negara kepulauan yang terdampak pandemi. Perekonomian Maladewa dan Kepulauan Bahama mengalami kontraksi yang cukup hebat. Alhasil instabilitas ekonomi berdampak kepada berbagai pengambilan kebijakan politik. Maladewa dan Kepulauan Bahama sendiri memiliki kondisi ekonomi dan politik yang hampir sama semasa pandemi. Kedua negara yang menggantungkan ekonominya pada sektor pariwisata tersebut mengalami perubahan hebat setelah diberlakukannya pembatasan. Hal ini dikarenakan Maladewa memberikan porsi sekitar 25% kepada sektor pariwisata, sementara Bahama

memberikan porsi yang lebih besar sekitar 40% dari perekonomian negara. Alhasil setelah dilanda pandemi, berbagai perusahaan terpaksa memotong anggaran hingga memberhentikan pegawai untuk tetap bertahan. Usaha-usaha kecil pun mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. Apalagi di Kepulauan Bahama yang sempat mengalami bencana Topan Dorian sebelum pandemi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini berusaha mengangkat alasan munculnya permasalahan instabilitas ekonomi dan politik akibat Pandemi Covid-19 di Maladewa dan Kepulauan Bahama.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah telaah mengenai penelitian sebelumnya yang serupa. Adapun dalam hal ini dibutuhkan ulasan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendukung penelitian ini. Akan tetapi, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian lebih banyak membahas mengenai pariwisata sebagai penyebab instabilitas ekonomi di suatu negara ataupun membahas mengenai suatu regional tertentu. Adapun berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama yaitu artikel yang ditulis oleh Godfrey Baldacchino & Ferreira yang berjudul *“Competing Notions of Diversity in Archipelago Tourism: Transport Logistics, Official Rhetoric and Inter-Island Rivalry in the Azores”*. Artikel ini membahas pariwisata negara kepulauan dari segi geografis dan keberagaman budaya. Selanjutnya, Baldacchino dan Ferreira juga menjelaskan mengenai persaingan antar pulau-pulau internal di Azores untuk menarik wisatawan dengan berbagai promosi yang mengarah kepada inkonsistensi kebijakan. Keduanya menjelaskan bahwa perbedaan yang menjadi keunikan atau kekhasan bagi pariwisata kepulauan dapat menjadi sesuatu yang menurunkan daya tarik wisata, sebab adanya rivalitas yang muncul antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh sebab itu, kesatuan dan persatuan di dalam mengakselerasi kegiatan pariwisata diperlukan untuk meningkatkan sektor pariwisata secara merata. Artikel ini memberikan wawasan mengenai bagaimana pentingnya proyeksi ‘perbedaan’ yang ada pada negara kepulauan membentuk persepsi mengenai pariwisata dari satu wilayah ke wilayah lainnya, yang mana berkontribusi terhadap efektivitas promosi pariwisata (Baldacchino & Ferreira, 2013).

Artikel rujukan yang ditulis oleh Baldacchino dan Ferreira ini menjadi salah satu pedoman dalam melakukan penelitian terkait dampak Pandemi Covid-19 terhadap negara Kepulauan Bahama dan Maladewa, sebab efektivitas promosi pariwisata juga dipengaruhi oleh persepsi sebuah wilayah akan model pariwisata yang digunakan. Hal tersebut akan berguna dalam memetakan model pariwisata di Bahama dan Maladewa serta menjelaskan instabilitas ekonomi-politik yang dapat muncul. Akan tetapi, artikel rujukan ini memiliki tujuan penelitian yang berbeda dengan penelitian mengenai Kepulauan Bahama dan Maladewa ini, sebab penelitian Baldacchino dan Ferreira lebih fokus kepada rivalitas yang memengaruhi efektivitas promosi pariwisata. Sementara penelitian ini akan berfokus kepada dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap pariwisata di negara kepulauan yang sangat bergantung pada sektor tersebut.

Penelitian rujukan selanjutnya adalah artikel Mark P. Hampton dan Julia Jeyacheya yang berjudul *“Tourism-Dependent Small Islands, Inclusive Growth, and the Blue Economy”*. Artikel ini menekankan mengenai *small islands tourism*. Artikel ini

menjelaskan mengenai perekonomian negara-negara berkembang berbentuk kepulauan dengan luas wilayah yang minim menghadapi masalah dengan memaksimalkan keuntungan dari sektor pariwisata. Hampton & Jeyacheya menekankan bahwa permasalahan menjadi dilematis ketika melihat negara-negara kecil yang bergantung pada sektor ekonomi itu harus memenuhi kebutuhan para wisatawan dengan daya tampung di luar kapasitas mereka. Sementara seiring berjalannya waktu permintaan akan lahan baru hingga makanan akan terus meningkat. Meskipun pada jangka pendek, negara-negara tersebut tentu memanen keuntungan dari pariwisata global, namun hal tersebut juga akan berdampak kepada kelestarian lingkungan hingga struktur sosial di sana (Hampton & Jeyacheya, 2020).

Penelitian oleh Hampton dan Jeyacheya menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian ini, sebab bahasannya terkait *small islands tourism* dapat membantu dalam menjelaskan ketergantungan negara kepulauan terhadap pariwisata serta dampaknya terhadap instabilitas politik. Di sisi lain, penelitian Hampton dan Jeyacheya memiliki tujuan penelitian yang lebih fokus terhadap permasalahan pariwisata di negara kecil yang mana juga membahas mengenai strategi pemecahan masalah melalui konsep *blue economy*.

Selanjutnya adalah penelitian Amit Ranjan yang berjudul “*COVID-19: Economic Impact and Challenges for the Maldives*”. Artikel ini menggambarkan secara padat mengenai kondisi ekonomi di Maladewa sebelum dan setelah dilanda pandemi Covid-19 hingga upaya pemulihannya. Selain itu, artikel ini memberikan penekanan bahwa Maladewa memiliki ketergantungan yang besar pada sektor pariwisata dan terdampak cukup besar dengan kontraksi pada perekonomiannya. Hal tersebut juga berdampak kepada para pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya akibat kondisi ekonomi perusahaan yang buruk. Selain itu, Ranjan juga memasukkan penjelasan mengenai keberagaman yang ada di Maladewa termasuk tentang pekerja migran. Ditambah pula dengan respon pemerintah Maladewa dalam menghadapi pandemi. Dengan demikian, gambaran mengenai kondisi politik juga ekonomi masa pandemi dijelaskan dengan ringkas dan padat pada artikel ini (Ranjan, 2020). Sehingga penelitian Amit Ranjan menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian ini, yakni dalam menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan politik di Maladewa secara khusus. Di samping itu, penelitian ini juga akan memperkaya kajian serupa dengan menghubungkan antara ketergantungan negara kepulauan terhadap pariwisata dan dampak Pandemi Covid-19 yang kemudian menyebabkan instabilitas ekonomi-politik.

Penelitian rujukan selanjutnya adalah penelitian Allan Wright yang berjudul “*Development Challenges in The Bahamas*”. Artikel menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi di Kepulauan Bahama dan upaya untuk meningkatkan perekonomiannya. Di samping itu, artikel ini mengambil pembatasan pada masa Krisis Global 2008 dan menjelaskan bagaimana Bahama menghadapi krisis tersebut. Pada kesimpulannya, artikel ini menjelaskan bahwa Bahama dapat melewati krisis tersebut. Meskipun Bahama bergantung pada sektor pariwisata dan menjadi rentan dengan adanya krisis, namun negara ini mampu bertahan, yang mana juga disokong oleh perekonomian Amerika Serikat sebagai sponsor utamanya (Wright, 2018). Penelitian Allan Wright memiliki model penelitian yang serupa dengan penelitian ini, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan keterkaitan antara kondisi krisis dan ketergantungan akan pariwisata. Akan tetapi, penelitian Allan Wright berfokus pada

kasus Krisis 2008, sementara penelitian ini akan berfokus pada kasus Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan memahami lebih jauh mengenai nilai dan karakteristik khusus dari objek yang diteliti. Selanjutnya, penelitian jenis ini berusaha memberikan pemahaman mendalam mengenai objek yang ditelitinya (Palmer & Bolderston, 2006). Hal ini dikarenakan, penelitian kualitatif mendorong peneliti untuk masuk lebih dalam untuk memahami dan menginterpretasikan mengenai objek yang diteliti. Sehingga gambaran yang didapatkan dari penelitian kualitatif cenderung bersifat kompleks, komprehensif dan detail sebab peneliti berusaha menjadi bagian dari penelitian tersebut dan turut merasakan bagaimana perkembangan objek yang diteliti. Maka, penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai penelitian komprehensif (*comprehensive research*) (Seixas et al., 2017). Akan tetapi, penelitian kualitatif sendiri tidak dapat dijelaskan secara komprehensif. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Hal tersebut yakni keterkaitan antara pertanyaan penelitian, metodologi, analisis dan data yang diperoleh serta maksud dari penelitian itu sendiri (Mohajan, 2018).

Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif deskriptif berusaha menggali karakteristik yang dimiliki oleh objek dan menjelaskannya secara holistik. Metode ini berusaha menjelaskan mengenai validitas deskriptif. Validitas deskriptif berpedoman kepada tujuan untuk menjelaskan objek penelitian sebagaimana keadaannya secara faktual. Oleh karena itu Braynan menyebutkan bahwa peneliti harus menjaga jarak terdekat dengan berbagai informasi yang muncul di permukaan (*keep close to the surface*) untuk menjelaskan dengan sesungguhnya mengenai keadaan objek penelitian (Seixas et al., 2017). Adapun pendekatan kualitatif deskriptif ini dipadukan dengan pendekatan silang (*cross-sectional*) yang mana hanya akan membatasi objek penelitian pada kurun waktu tertentu (Sangadji, 2010), dimana dalam hal ini, rentang tahun 2019-2020.

Selanjutnya, tipe analisis yang digunakan adalah analisis konten atau kajian pustaka. Dalam hal ini, jenis analisis konten yang digunakan adalah analisis konten kualitatif. Analisis konten kualitatif menekankan kepada analisis data dan juga tafsir teks. Analisis konten ini menggali mengenai bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi daripada hanya sekedar menjawab tentang apa yang terjadi (Ahmad, 2018). Sehingga dalam analisis konten, teks dimaknai tidak hanya secara tekstual melainkan juga esensial. Teks yang bersifat polisemik mendorong interpretasi yang luas sebab strukturnya yang berupa narasi dan juga mengajak pembacanya untuk berpikir sesuai alur penulis. Interpretasi yang dimaksudkan dalam analisis konten yakni interpretasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Akan tetapi, dalam menginterpretasikan teks tersebut, perlu diperhatikan makna yang ingin disampaikan sesuai dengan kode kata atau tanda yang telah dipaparkan oleh penulis (Rahardjo, 2018). Dengan demikian, analisis konten yang digunakan merupakan analisis konten kualitatif yang lebih bertopang kepada analisis tekstual dan esensial dari sumber-sumber yang tersedia di lapangan.

Sumber-sumber data berupa data sekunder. Data sekunder biasanya menjadi pelengkap dari sebuah penelitian, setelah data primer. Sebab data sekunder yang tersedia terkadang memiliki relevansi yang rendah terhadap objek dan lingkup penelitian. Akan tetapi, dalam analisis konten atau kajian literatur, data sekunder diperlukan untuk menambah referensi dan mempertajam analisa untuk membuat suatu kesimpulan. Adapun data sekunder sendiri terdiri atas data internal dan eksternal. Data internal adalah milik internal suatu organisasi yang biasanya tidak dapat diakses secara cuma-cuma. Sehingga dalam hal ini, data eksternal-lah yang menjadi sumber data utama. Adapun yang dimaksud data eksternal merupakan buku, jurnal, terbitan periodik suatu instansi swasta maupun pemerintah, serta terbitan media massa atau perusahaan tertentu. Selain itu, sumber data tersebut diakses melalui manual ataupun dalam format elektronik (Sangadji, 2010).

Adapun data yang diperoleh berupa data kualitatif yang berasal dari akumulasi berbagai sumber yang telah dianalisis menjadi satu kesimpulan jenuh. Data kualitatif tersebut dapat berupa kata-kata maupun angka. Data kualitatif yang didapatkan melalui pengumpulan data (*data collecting*) kemudian direduksi melalui proses reduksi data (*data reduction*). Reduksi data ini diartikan sebagai pemilihan, penyeleksian dan penyederhanaan data mentah yang didapat dari berbagai sumber. Proses ini dilakukan berulang-ulang untuk mendapat data yang jenuh. Selanjutnya adalah penyajian data (*data display*). Penyajian data merupakan tahapan di mana data ditunjukkan dalam susunan informasi yang teratur dan informatif. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif, bagan atau tabel (Miles & Huberman, 1994; Sangadji, 2010).

KERANGKA PEMIKIRAN

KONSEP DAYA TARIK PARIWISATA DAN KARAKTERISTIK PARIWISATA NEGARA KEPULAUAN

Daya tarik pariwisata (*tourism attraction*) merupakan suatu elemen penting dalam mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan wisata di suatu wilayah. Daya tarik pariwisata dapat mencakup elemen yang berwujud fisik maupun tidak (Erislan, 2016). Daya tarik sendiri merupakan alasan atau motivasi bagi para pelaku wisata untuk memilih tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata. Daya tarik juga menjadi penting sebagai ciri khas dari kawasan wisata tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Dean MacCanell bahwa '*penanda*' (*marker*) menjadi suatu daya tarik yang menjadikan sesuatu hal berbeda dari lainnya. Ia juga menambahkan hal ini terjadi ketika wisatawan mendapatkan sesuatu yang tidak ia dapatkan di tempat lain berdasarkan observasinya atas apa yang ia saksikan (*sight*). Maka, mereka merekam dalam memorinya bahwa suatu kawasan wisata tertentu memiliki daya tarik tertentu yang membedakannya dari kawasan wisata lain. Hal ini membantu proses promosi (*branding*) sebuah kawasan wisata (Nowacki, 2013), yang mana erat kaitannya dengan unsur budaya, alam hingga kebijakan pariwisata setempat (Manhas et al., 2016).

Selain membantu proses promosi, daya tarik juga memengaruhi tingkat kepuasan wisatawan (*tourist satisfaction*) yang berkunjung. Sehingga sesuatu hal yang dijadikan sebagai daya tarik wisata harus mendapat perhatian dan pengawasan dari pengelola, yakni pemerintah setempat, agar dapat memberi kepuasan bagi para wisatawan yang datang berkunjung (Nowacki, 2013). Dengan demikian, daya tarik pariwisata menjadi

pendorong pelaku wisata untuk melakukan kegiatan wisata ke suatu tempat. Sehingga, daya tarik (*attraction*) menjadi penentu utama untuk melihat potensi, keberlangsungan atau masa depan pariwisata di sebuah wilayah tertentu.

Adapun dalam melihat daya tarik di kedua destinasi wisata, yakni Maladewa dan Kepulauan Bahama, diperlukan konsep daya tarik pariwisata. Dalam hal ini, konsep daya tarik pariwisata dibutuhkan untuk melihat dan membandingkan daya tarik pariwisata di kedua negara. Dalam rangka melihat hal tersebut, maka dapat digunakan konsep 4A yang disebutkan oleh Cooper yakni objek wisata (*attraction*), aksesibilitas (*accessibility*), kelengkapan (*amenities*), dan layanan tambahan/fasilitas umum (*ancillary services*) (Khotimah, K., & Wilopo, 2017).

Objek wisata (*attraction*) adalah faktor utama yang menurut Laws adalah faktor primer yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke sebuah destinasi wisata. Adapun objek wisata meliputi wisata budaya (*cultural tourism*), alam (*natural tourism*), hingga *eco-tourism*. Selanjutnya, aksesibilitas (*accessibility*) merupakan ukuran mengenai kualitas dari kenyamanan yang diberikan kepada pengunjung, yang mana meliputi infrastruktur, akomodasi hingga layanan transportasi. Sementara kelengkapan (*amenities*) membahas mengenai layanan serta fasilitas yang mencukupi kebutuhan dasar dan mendetail dari para pengunjung. Hal ini meliputi petunjuk wisata, makanan & minuman, hotel, bar, penginapan, dan sebagainya. Terakhir yakni layanan tambahan/fasilitas umum (*ancillary services*) yang merupakan bagian penentu keberlangsungan kegiatan pariwisata yang melibatkan berbagai pihak. Adapun hal tersebut meliputi lembaga promosi wisata, asosiasi hingga komunitas pariwisata (Andrianto & Sugiama, 2016; Lee, 2014).

Selain daya tarik pariwisata, untuk memahami pariwisata di Maladewa dan Kepulauan Bahama, maka dapat dilihat dari karakteristik pariwisatanya secara khusus, yakni pariwisata negara kepulauan. Pada umumnya, meskipun memiliki bentuk terpisah antara satu pulau dengan pulau lainnya, negara kepulauan biasanya mendapat keuntungan dengan bentuknya tersebut. Mulai dari paket pariwisata yang ada hingga berbagai sektor lainnya yang dapat digerakkan melalui kegiatan pariwisata. Akan tetapi, untuk mencapai keuntungan tersebut ketersediaan dan kesiapan infrastruktur menjadi salah satu kunci utama. Hal ini menjadi perhatian utama bagi aktivitas pariwisata di negara kepulauan karena koneksi dari satu daerah ke daerah lainnya sangat dibutuhkan. Kolaborasi dan koordinasi antardaerah dapat menjadi mudah dalam mengakselerasikan kegiatan pariwisata dengan keberadaan fasilitas infrastruktur yang memadai (Baldacchino, 2016).

Adapun pariwisata di negara-negara kepulauan identik dengan berbagai destinasi wisata alam maupun historis yang tersebar di berbagai tempat dengan suasana beragam meski dalam satu wilayah yurisdiksi suatu negara. Pengalaman yang beragam dan unik menuju satu pulau satu ke pulau lainnya baik melalui darat, air maupun udara. Transportasi yang disediakan pun terkadang menjadi suatu ikon tersendiri, seperti kayak ataupun kano. Keunikan ini tidak dapat ditemukan di daerah lainnya dengan pengalaman yang serupa. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik sekaligus karakteristik dari pariwisata di negara kepulauan (Baldacchino & Ferreira, 2013).

Selain pengalaman unik yang dapat diperoleh ketika berwisata ke negara kepulauan, ada pula karakteristik lainnya yang dimiliki oleh pariwisata di negara kepulauan. Royle menyebutkan bahwa karakteristik dari pariwisata di negara kepulauan

adalah keterisolasian (*isolation*) dan keterbatasan (*boundedness*). Dalam hal ini, isolasi yang dimaksud adalah adanya struktur khusus pada masing-masing skema pariwisata di setiap pulau yang terpisah dari pulau utama (*mainland*) yang disebut sebagai kekhususan yurisdiksi (*jurisdiction specificity*). Oleh karenanya, perekonomian di negara kepulauan dikatakan sebagai ekonomi yang terspesialisasi atau terpisah-pisah. Meskipun pada akhirnya, tetap bermuara kepada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Di samping itu, keterbatasan yang dimaksud adalah adanya unsur-unsur yang terbatas dari pengaruh luar, yang mana merupakan sesuatu yang otentik dan khas bagi wilayah pariwisata tersebut. Salah satunya dikenal sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) (Holden & Fennell, 2012; Razak & Suprihardjo, 2013).

Demikianlah secara umum karakteristik pariwisata di negara-negara kepulauan. Adapun hal tersebut meliputi, eksotisme (*exoticism*), keterisolasian (*isolation*), keterbatasan (*boundedness*) dan juga kearifan lokal (*local wisdom*) hingga masyarakat lokal/adat (*indigenous people*). Hal tersebut membawa kesan pariwisata yang berbeda dengan negara lainnya. Selain itu, karakteristik tersebut juga menjadi suatu daya tarik bagi pariwisata di negara-negara kepulauan. Akan tetapi, karakteristik masyarakat lokal/adat (*indigenous people*) perlu mendapat perhatian sebab dapat menjadi suatu penghambat ataupun ancaman (*threat*) terhadap integrasi kegiatan pariwisata di negara-negara kepulauan. Meskipun demikian, apabila manajemen kepariwisataannya direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, maka akan mendatangkan keuntungan bagi negara tersebut. Adapun jumlah negara kepulauan di dunia sendiri ada 36 negara dengan populasi yang beragam dan daya tarik yang berbeda-beda di setiap wilayahnya (Holden & Fennell, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KARAKTERISTIK PARIWISATA NEGARA KEPULAUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga berpengaruh terhadap stabilitas politik di negara tersebut. Adapun pariwisata bergantung pula kepada kondisi wilayah negara seperti letak geografis, topografi hingga bentuk negara. Dalam hal ini, negara kepulauan (*archipelagic state*) cenderung memiliki beragam destinasi wisata dengan bentuknya yang terdiri dari banyak pulau. Meskipun terpisah antara satu pulau dengan pulau lainnya, negara kepulauan biasanya mendapat keuntungan dengan bentuknya tersebut. Mulai dari paket pariwisata yang ada hingga berbagai sektor lainnya yang dapat digerakkan melalui kegiatan pariwisata. Akan tetapi, untuk mencapai keuntungan tersebut ketersediaan dan kesiapan infrastuktur menjadi salah satu kunci utama. Hal ini menjadi perhatian utama bagi aktivitas pariwisata di negara kepulauan karena koneksi dari satu daerah ke daerah lainnya sangat dibutuhkan. Kolaborasi dan koordinasi antardaerah dapat menjadi mudah dalam mengakselerasikan kegiatan pariwisata dengan keberadaan fasilitas infrastruktur yang memadai (Baldacchino, 2016).

Adapun pariwisata di negara-negara kepulauan identik dengan berbagai destinasi wisata alam maupun historis yang tersebar di berbagai tempat dengan suasana beragam meski dalam satu wilayah yurisdiksi suatu negara. Pengalaman yang beragam dan unik menuju satu pulau satu ke pulau lainnya baik melalui darat, air maupun udara. Transportasi yang disediakan pun terkadang menjadi suatu ikon tersendiri, seperti kayak

ataupun kano. Keunikan ini tidak dapat ditemukan di daerah lainnya dengan pengalaman yang serupa. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik sekaligus karakteristik dari pariwisata di negara kepulauan (Baldacchino & Ferreira, 2013).

Selain pengalaman unik yang dapat diperoleh ketika berwisata ke negara kepulauan, ada pula karakteristik lainnya yang dimiliki oleh pariwisata di negara kepulauan. Royle menyebutkan bahwa karakteristik dari pariwisata di negara kepulauan adalah keterisolasian (*isolation*) dan keterbatasan (*boundedness*). Dalam hal ini, isolasi yang dimaksud adalah adanya struktur khusus pada masing-masing skema pariwisata di setiap pulau yang terpisah dari pulau utama (*mainland*) yang disebut sebagai kekhususan yurisdiksi (*jurisdiction specificity*). Oleh karenanya, perekonomian di negara kepulauan dikatakan sebagai ekonomi yang terspesialisasi atau terpisah-pisah. Meskipun pada akhirnya, tetap bermuara kepada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Di samping itu, keterbatasan yang dimaksud adalah adanya unsur-unsur yang terbatas dari pengaruh luar, yang mana merupakan sesuatu yang otentik dan khas bagi wilayah pariwisata tersebut. Salah satunya dikenal sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) (Holden & Fennell, 2012; Razak & Suprihardjo, 2013).

Demikianlah secara umum karakteristik pariwisata di negara-negara kepulauan. Adapun hal tersebut meliputi, eksotisme (*exoticism*), keterisolasian (*isolation*), keterbatasan (*boundedness*) dan juga kearifan lokal (*local wisdom*) hingga masyarakat lokal/adat (*indigenous people*). Hal tersebut membawa kesan pariwisata yang berbeda dengan negara lainnya. Selain itu, karakteristik tersebut juga menjadi suatu daya tarik bagi pariwisata di negara-negara kepulauan. Akan tetapi, karakteristik masyarakat lokal/adat (*indigenous people*) perlu mendapat perhatian sebab dapat menjadi suatu penghambat ataupun ancaman (*threat*) terhadap integrasi kegiatan pariwisata di negara-negara kepulauan. Meskipun demikian, apabila manajemen kepariwisataannya direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, maka akan mendatangkan keuntungan bagi negara tersebut. Adapun jumlah negara kepulauan di dunia sendiri ada 36 negara dengan populasi yang beragam dan daya tarik yang berbeda-beda di setiap wilayahnya (Holden & Fennell, 2012).

DAYA TARIK PARIWISATA DI MALADEWA DAN KEPULAUAN BAHAMA

Daya tarik pariwisata (*tourism attraction*) merupakan suatu elemen penting dalam mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan wisata di suatu wilayah. Daya tarik sendiri merupakan alasan atau motivasi bagi para pelaku wisata untuk memilih tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata. Daya tarik juga menjadi penting sebagai ciri khas dari kawasan wisata tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Dean MacCannell bahwa '*penanda*' (*marker*) menjadi suatu daya tarik yang menjadikan sesuatu hal berbeda dari lainnya. Ia juga menambahkan hal ini terjadi ketika wisatawan mendapatkan sesuatu yang tidak ia dapatkan di tempat lain berdasarkan observasinya atas apa yang ia saksikan (*sight*).

Maka, mereka merekam dalam memorinya bahwa suatu kawasan wisata tertentu memiliki daya tarik tertentu yang membedakannya dari kawasan wisata lain. Hal ini membantu proses promosi (*branding*) sebuah kawasan wisata. Selain membantu proses promosi, daya tarik juga memengaruhi tingkat kepuasan wisatawan (*tourist satisfaction*) yang berkunjung. Sehingga sesuatu hal yang dijadikan sebagai daya tarik wisata harus mendapat perhatian dan pengawasan dari pengelola, yakni pemerintah setempat, agar

dapat memberi kepuasan bagi para wisatawan yang datang berkunjung (Nowacki, 2013). Dengan demikian, daya tarik pariwisata menjadi pendorong pelaku wisata untuk melakukan kegiatan wisata ke suatu tempat. Sehingga, daya tarik (*attraction*) menjadi penentu utama untuk melihat potensi, keberlangsungan atau masa depan pariwisata di sebuah wilayah tertentu.

Adapun dalam melihat daya tarik di kedua destinasi wisata, yakni Maladewa dan Kepulauan Bahama, diperlukan konsep daya tarik pariwisata. Dalam hal ini, konsep daya tarik pariwisata dibutuhkan untuk melihat dan membandingkan daya tarik pariwisata di kedua negara. Adapun dalam hal ini digunakan konsep 4A yang disebutkan oleh Cooper yakni objek wisata (*attraction*), aksesibilitas (*accessibility*), kelengkapan (*amenities*), dan layanan tambahan/fasilitas umum (*ancillary services*) (Khotimah, K., & Wilopo, 2017).

Objek wisata (*attraction*) adalah faktor utama yang menurut Laws adalah faktor primer yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke sebuah destinasi wisata. Adapun objek wisata meliputi wisata budaya, alam, hingga *eco-tourism*. Selanjutnya, aksesibilitas (*accessibility*) merupakan ukuran mengenai kualitas dari kenyamanan yang diberikan kepada pengunjung, yang mana meliputi infrastruktur, akomodasi hingga layanan transportasi. Sementara kelengkapan (*amenities*) membahas mengenai layanan serta fasilitas yang mencukupi kebutuhan dasar dan mendetail dari para pengunjung. Hal ini meliputi petunjuk wisata, makanan & minuman, hotel, bar, penginapan, dan sebagainya. Kemudian layanan tambahan/fasilitas umum (*ancillary services*) adalah bagian penentu keberlangsungan kegiatan pariwisata yang melibatkan berbagai pihak. Adapun hal tersebut meliputi lembaga promosi wisata, asosiasi hingga komunitas pariwisata (Andrianto & Sugiama, 2016; Lee, 2014).

Adapun dalam bahasan ini Maladewa dan Kepulauan Bahama merupakan negara kepulauan yang menawarkan daya tarik eksotis yang kuat. Maladewa sendiri merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 26 atol karang yang terbentang sepanjang 800 km. Malé merupakan ibukota dari Maladewa yang menampung sepertiga dari total populasi di negara itu, yakni sekitar 113 ribu jiwa. Maladewa menawarkan pariwisata yang didominasi atraksi wisata alam dengan berbagai fasilitas *resort* hingga pengalaman bawah laut yang menarik. Sektor pariwisata juga didukung oleh sektor perikanan (*fisheries*) (Asian Development Bank, 2015). Selanjutnya, pemandangan laut dan susunan atol-atol yang terbentang memberi kesan 'dunia yang berbeda' yang biasanya muncul di dalam cerita dongeng fiksi. Sehingga Maladewa dijuluki dengan ungkapan "*Sunny side of life*". Maladewa memanfaatkan keindahan alam ini untuk menarik para wisatawan. Akses masuk ke maladewa difasilitasi oleh Bandara Male', yang menjadi akses masuk utama ke negara ini (Zubair & Bouchon, 2014).

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan *Maldives Marketing & PR Corporation* bersama dengan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kepariwisataan, memberdayakan pariwisata di Maladewa dengan berbagai promosi mulai dari alam hingga layanan makanan dan minuman. Adapun beberapa organisasi tersebut antara lain adalah MTDC (*Maldives Tourism Development Corporation*) dan MATI (*Maldives Association of Tourism Industry*). Dalam hal ini, pemerintah melalui *Maldives Marketing & PR Corporation* mempromosikan wisata melalui laman *visit Maldives* dengan tajuk '*sunny side of life*'. Dalam laman tersebut atraksi pariwisata dibedakan menjadi empat yakni *resort*, hotel, *liveaboard* dan *guesthouse*. Adapun *resort*

dan hotelnya memiliki cakupan yang sangat luas untuk liburan pasangan hingga keluarga.

Dalam laporan Kementerian Pariwisata Maladewa, akomodasi hotel pada tahun 2018 mengembangkan kapasitas wisatawan hingga hampir 2000 orang yang mana dibagi ke dalam dua macam hotel yakni *airport hotel* dan *city hotel*. *Airport hotel* terletak di kawasan pulau tempat bandara dibangun. Sementara *city hotel* merupakan hotel yang dibangun di pusat kota tempat atraksi wisata lainnya. Selanjutnya, layanan *liveaboard* menawarkan pengalaman berkeliling dari satu pulau atau atol ke yang lainnya. Demi menunjang layanan ini, pemerintah menyediakan suatu transportasi yang beroperasi layaknya kapal pesiar, yang disebut sebagai Kapal Safari (*Safari Vessel*).

Kemudian *guesthouse* yang disediakan terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2014 yang hanya berjumlah 220 *guesthouses* ditingkatkan menjadi 521 pada tahun 2018. Dalam hal ini, pemerintah Maladewa memang memiliki tujuan mengembangkan bisnis kecil-kecilan milik warganya, yang mana salah satunya adalah *guesthouse*. Sementara organisasi non-pemerintah, seperti MTDC dan MATI berkontribusi dalam promosi pariwisata Maladewa. MTDC sendiri bergerak dalam bidang pengembangan *resort* di beberapa *island-hotel*. Selain itu, pada tahun 2021 di bulan Agustus, MATI juga berkontribusi dengan para pengambil kebijakan dalam penyelesaian masalah limbah kimia di wilayah Malé serta turut serta menjembatani berbagai kerjasama dengan investor luar. Dengan koordinasi bersama tersebut, pengembangan Maladewa sebagai destinasi wisata dapat dimaksimalkan meski tidak memiliki banyak hal selain alam untuk ditawarkan (MATI, n.d.; Ministry of Tourism of Republic of Maldives, 2019; MTDC, 2021).

Meskipun tidak ada wisata historis ataupun budaya di Maladewa, tetapi pemerintahnya membuat suatu 'pemisahan' di mana pengembangan pariwisata dapat terus berjalan beriringan dengan pelestarian identitas lokal masyarakat muslim di sana. Pemisahan ini membentuk istilah baru untuk daerah wisata dan daerah pemukiman warga, yakni *mainland* dan *island-hotel*. Pemisahan ini memungkinkan wisatawan mendapatkan pengalaman luar biasa untuk berada di pulau terisolasi dengan pemandangan yang memesona. Ditambah lagi, mereka dapat mengakses minuman beralkohol di daerah *island-hotel*. Uniknya, pemerintah melarang pengaruh budaya seperti ini masuk ke *mainland*, di mana di sana perdagangan minuman beralkohol dilarang seiring dengan penggunaan pakaian renang seperti bikini. Para wisatawan hanya diperbolehkan menggunakan pakaian tersebut di kawasan *island-hotel*. Akan tetapi, pemerintah juga tetap membuka akses untuk atraksi wisata seperti *scuba-diving* dan *snorkeling* di wilayah pesisir yang ditinggali nelayan, yang mana secara teknis telah diatur oleh ketentuan pemerintah setempat (Auvray, 2010).

Selanjutnya, yakni Kepulauan Bahama. Kepulauan Bahama memiliki potensi wisata alam dengan susunan pulau dan atol berjumlah sekitar 700 pulau serta atol. Maka, pemerintah menempatkan porsi besar bagi pariwisata dalam menyokong perekonomian negara (Wright, 2018). Dalam hal ini, pemerintah berkontribusi langsung melalui Kementerian Pariwisata untuk mengatur jalannya kegiatan wisata, yakni melalui laman *The Islands of The Bahamas, Nassau Paradise Island, Grand Bahamas Island*, dan *The Out Islands of The Bahamas* (Ministry of Tourism of Bahamas, 2021). Selain itu, ada pula korporasi yang bergerak sendiri dalam sektor pariwisata, yakni TDC (*Tourism Development Corporation*). Korporasi ini bergerak di bidang pembangunan dan

pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada komunitas (*community-based tourism*) dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) (TDC, 2021).

Pariwisata di Bahama menyajikan wisata *eco-tourism*, wisata budaya, fasilitas *diving* dan memancing (Hendrickson & Skerrette, 2020). Dalam hal ini, potensi Kepulauan Bahama adalah perairan yang luar biasa, maka pariwisatanya kebanyakan bergantung kepada pariwisata bahari (*nautical tourism*). Pariwisata ini meliputi pelayaran dan penginapan di kapal pesiar yang kemudian dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi dan sebagainya.

Salah satu atraksi wisata yang terkenal adalah pelabuhan di salah satu pulau di Kepulauan Bahama, yaitu Pulau Abaco. Pulau Abaco sendiri menawarkan atraksi wisata alam dan budaya yang berpusat di *Marsh Harbor* yang dilengkapi berbagai toko hingga *restaurant* dan *resort*. Salah satunya yakni Klub dan Penginapan *Green Turtle*. Di sini juga terdapat beberapa fasilitas seperti bandara, yakni bandara internasional *Leonard M. Thompson* dan bandara *The Treasure Cay*. Di samping itu juga disediakan berbagai layanan penginapan atau hotel di Pulau Abaco, seperti *The Sandpiper Inn*, *The Abaco Club of Winding Bay*, hingga *Abaco Beach Resort & Marina* di *Marsh Harbor* (Carroll et al., 2016). Adapun untuk mempermudah akses laut, terdapat Pelabuhan Bahama yang menjadi pelabuhan kargo utama bagi pelabuhan *Grand Bahama*. Selain kedua pelabuhan tersebut, di Pulau Abaco juga terdapat sebuah pelabuhan kecil yang ramai, yaitu Pelabuhan *Marsh* (Bello et al., 2020).

Selain itu, negara yang terletak di kawasan Laut Karibia ini juga menawarkan wisata golf yang tersebar di seluruh wilayahnya dengan total sekitar tiga belas tempat bermain golf. Selain menawarkan destinasi wisata, Bahama juga menyediakan kemudahan bagi para pasangan ingin melaksanakan acara pernikahan di sana dengan layanan terbaik serta pemandangan yang luar biasa (González-Sánchez et al., 2012). Pemandangan yang luar biasa ditawarkan oleh beberapa atraksi wisata seperti taman nasional *Lucayan* dan Pantai *Gold Rock*, yang juga disertai berbagai fasilitas yang lengkap seperti hotel di setiap atraksi wisata (Thomas, 2016).

Pariwisata di Maladewa dan Kepulauan Bahama tentu memiliki daya tarik yang berbeda. Sehingga penting untuk mengenali daya tarik dari kedua negara kepulauan yang berbeda ini, meski keduanya termasuk kawasan wisata *warm water* (Baldacchino, 2006). Berdasarkan penjelasan di atas, berikut dirangkum dalam tabel 1 mengenai daya tarik pariwisata di Maladewa dan Kepulauan Bahama sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Tabel 1. Daya Tarik Pariwisata di Maladewa dan Kepulauan Bahama

Daya Tarik	No.	Maladewa	No.	Kepulauan Bahama
Atraksi Wisata	1	Wisata alam	1	Wisata <i>eco-tourism</i> dan bahari
	2	Snorkeling	2	Diving
	3	Diving	3	Pulau Abaco
			4	Lapangan golf
			5	Taman Nasional Lucayan

			6	Pantai <i>Gold Rock</i>
Kelengkapan	1	<i>Island-hotel</i>	1	<i>The Sandpiper Inn</i>
			2	<i>Abaco Club</i>
			3	Klub & Penginapan <i>Green Turtle</i>
Aksesibilitas	1	<i>Liveaboard</i> dengan fasilitas Kapal Safari (<i>Safari Vessel</i>)	1	Pelabuhan <i>Marsh</i>
	2	Bandara Male'	2	Pelabuhan Bahama
			3	Pelabuhan <i>Grand Bahama</i>
			4	Bandara Internasional <i>Leonard M. Thompson</i>
5	Bandara <i>The Treasure Cay</i>			
Layanan Tambahan/Fasilitas Umum	1	MATI (<i>Maldives Association of Tourism Industry</i>)	1	Kementerian Pariwisata yang membawahi beberapa agenda yakni <i>The Islands of The Bahamas, Nassau Paradise Islands, Grand Bahamas Islands, dan The Out Islands of Bahamas Islands.</i>
	2	MTDC (<i>Maldives Tourism Development Corporation</i>)	2	Lembaga privat TDC (<i>Tourism Development Corporation</i>)
	3	Kementerian Pariwisata dan <i>Maldives Marketing & PR Corporation</i>		

(Sumber: diolah oleh penulis)

KEBIJAKAN PARIWISATA DI MALADEWA DAN KEPULAUAN BAHAMA

Kebijakan Pariwisata di Maladewa

Pariwisata di Maladewa telah menempati posisi yang krusial dalam perekonomian nasional. Maladewa menjadikan pariwisata global sebagai salah satu pemasukan utama yang mengambil satu per tiga porsi dari ekonomi nasional. Dalam pengembangan awalnya, Maladewa memulai dengan mengembangkan dua pulau sebagai destinasi wisata *resort* atau hotel. Pengembangan yang dilakukan sejak tahun 1970-an ini terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2000-an dibentuklah *tourism desk front*.

Tourism desk front dibentuk sebagai garda terdepan pelayanan pariwisata. Selanjutnya juga diadakan pemulihan melalui *Recovery Policy* yang dikeluarkan pada tahun 2004. Pada tahun 2006, ada upaya untuk melakukan privatisasi bandara Male', yang kemudian baru dapat diakselerasi pada masa pemerintahan Presiden Nasheed tahun 2009. Akan tetapi kemudian pada tahun 2012, perjanjian yang dilakukan dengan GMR India tersebut dibatalkan karena adanya kecenderungan Maladewa untuk mengambil lebih banyak keuntungan dengan bergabung ke dalam Jalur Sutra Maritim Abad 21 milik Tiongkok (Hasyaimi, 2016; Henderson, 2008).

Selanjutnya pada tahun 2007, Maladewa berhasil menyediakan belasan ribu fasilitas kasur dan perlengkapan penginapan untuk menampung lebih banyak wisatawan dengan pengembangan di tiga puluh lima pulau. Mulai tahun 2007 juga diperkenalkan TTMP (*Third Tourism Master Plan*) untuk perencanaan pengembangan pariwisata hingga tahun 2011. Dalam kerangka TTMP, Maladewa dengan bantuan dari UNDP (*United Nations Development Programme*) menerapkan *sustainable tourism*. Adapun kebijakan ini dikeluarkan dengan berbagai tujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui program-program pariwisata yang melibatkan masyarakat (*community-based tourism*), membuka lapangan pekerjaan, memperbaiki infrastruktur hingga mempromosikan budaya Maladewa.

Salah satu langkah yang berhasil dilakukan adalah melakukan revisi terhadap peraturan mengenai kepariwisataan, sehingga muncullah TGST (*Tourism Goods & Service Tax*) pada tahun 2008, yang juga merupakan bentuk perwujudan langkah-langkah sebelumnya terkait perpajakan di bidang pariwisata. Selain itu, pada tahun 2007-2008 dilakukan upaya promosi produk-produk lokal melalui kerjasama komunitas pemilik *resort* yang diwadahi oleh *Resort Forum*. Selanjutnya berbagai kebijakan juga dilaksanakan, seperti mempromosikan karir di bidang pariwisata, menarik minat masyarakat Maladewa untuk berpartisipasi di bidang pariwisata, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), hingga perbaikan bandara dan pelabuhan (Henderson, 2008; Ministry of Tourism & Civil Aviation of Maldives, 2011).

Selain kebijakan pengembangan pariwisata Maladewa dari segi infrastruktur dan kesiapan sumber daya, pemerintah juga membuat sebuah kebijakan untuk menjaga masyarakat Maladewa dalam kepercayaannya dan lepas dari pengaruh budaya Barat. Adapun kebijakan ini disebut sebagai *separation policy*. Dalam kebijakan ini dikenal istilah '*one island, one resort*' bersama dengan istilah '*island-resort*' dan '*mainland*'.

Istilah '*one island, one resort*' merujuk kepada upaya pengembangan berbagai pulau kecil di Maladewa sebagai *resort* bahkan pengembangan atol-atol yang berjumlah puluhan. Maka pulau-pulau tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai '*island-resort*'. Sementara '*mainland*' merujuk kepada pulau utama yang menjadi tempat tinggal masyarakat lokal. Kebijakan pemisahan kehidupan masyarakat lokal dengan pendatang menjadikan Maladewa sebagai destinasi wisata yang unik. Akan tetapi, dengan bertambahnya jumlah pengunjung yang datang, maka diperlukan lebih banyak *resort* untuk menampungnya, sehingga beberapa atol yang dekat dengan *mainland* dijadikan sebagai *island-resort*. Oleh karena itu, para pendatang dapat melihat kegiatan dan dinamika kehidupan masyarakat lokal dari jarak yang cukup dekat. Begitu pula dengan masyarakat lokal, terutama yang berada di pesisir (Auvray, 2010; Laingsingh, 2020; Rasheeda, 2012).

Adapun, kondisi pariwisata di Maladewa pada masa pandemi Covid-19 tidak seramai hari-hari normal sebelumnya. Berbagai kebijakan terkait kesehatan pun diterapkan guna meningkatkan kesadaran (*awareness*) akan pentingnya sanitasi dan kesehatan. Pemerintah Maladewa melalui HPA (*Health Protection Agency*) menekankan bahwa siapapun yang masuk ke Maladewa sudah harus melakukan serangkaian proses tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*). Selain itu, Kementerian Pariwisata setempat bersama HPA juga telah mengeluarkan pedoman yang membahas mengenai peran aktif publik dalam menjaga kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 pada sektor pariwisata. Adapun karantina dengan kurun waktu 14 hari merupakan salah satu yang diwajibkan untuk para pengunjung yang datang (Ministry of Tourism Republic of Maldives, 2021).

Kebijakan Pariwisata di Kepulauan Bahama

Kepulauan Bahama terkenal dengan pariwisata bahari miliknya dan juga berbagai tempat untuk melakukan permainan golf hingga *diving*. Adapun salah satu atraksi wisata terkenalnya adalah Pulau Abaco dengan pusatnya *Marsh Harbor*. Dalam hal ini suatu proyek yang dipelopori oleh sebuah organisasi non-profit, FOE (*Friends of the Environment*), mengusung konsep ekowisata mendapat tempat istimewa di hati pengunjung. Dengan mempertahankan unsur alamiah dari wisata Kepulauan Bahama, FOE berusaha untuk mempromosikan berbagai hal yang dapat dilakukan seperti *snorkeling*, bermain golf, *diving* hingga mengunjungi museum dan kehidupan hewan-hewan hutan. Proyek ini dinamakan *Abaco Trail Project*. Oleh karena hasilnya yang menjanjikan, pemerintah melalui BNT (*Bahamas National Trust*) mendukung inisiasi FOE. Keduanya bekerjasama dalam melakukan konservasi alam hingga mengatur pemanfaatan lahan untuk berbagai kebutuhan komersil lainnya (Carroll et al., 2016).

Selanjutnya, ada pula konsep '*accessible tourism*' yang diusung oleh Kepulauan Bahama. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan 'akses' tersebut adalah kemudahan yang didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Pemerintah yang prihatin terhadap keberadaan para disabilitas. Maka dikeluarkanlah sebuah peraturan khusus untuk para penyedia layanan wisata agar awas terhadap fasilitas para penyandang disabilitas. Peraturan tersebut adalah *Person with Disabilities (Equal) Opportunity Act* yang dikeluarkan pada tahun 2014, yang harus dilaksanakan oleh para penyedia layanan sekurang-kurangnya tiga tahun pasca dikeluarkannya peraturan ini. Pelaksanaannya diawasi oleh Kementerian Layanan Sosial dan terus digaungkan oleh pemerintah (TDC, n.d.).

Selain berbagai kebijakan terkait pengembangan pariwisata, pemerintah Bahama juga mengubah kebijakan pariwisata dikarenakan situasi pandemi. Adapun, peraturan tersebut tercantum dengan jelas pada laman pemerintah Bahama tentang pariwisata. Di sana dijelaskan bahwa apabila ingin masuk ke Kepulauan Bahama, maka harus telah menjalani tes PCR ataupun *Rapid Antigen*. Selain itu, diwajibkan bagi pendaftar untuk berkunjung setelah dua minggu pasca vaksin dosis pertama ataupun kedua. Kemudian, pemerintah Bahama juga menjelaskan bahwa bukti vaksinasi harus berupa bukti orisinal yang dikeluarkan pemerintah resmi. Apabila tertangkap terjadi pemalsuan maka akan diberikan sanksi berupa denda sepuluh ribu dolar atau dua tahun penjara. Selanjutnya, pemerintah Bahama juga mewajibkan *travel health visa* bagi para pengunjung.

Sementara untuk mobilisasi domestik, tidak diperlukan lagi terhitung pada 1 Oktober 2021 (The Government of Bahamas, 2021).

KETERGANTUNGAN MALADEWA DAN KEPULAUAN BAHAMA TERHADAP SEKTOR PARIWISATA

Ketergantungan Maladewa pada Sektor Pariwisata

Pariwisata Maladewa merupakan salah satu penopang perekonomian nasional negara tersebut. Sebagai salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat, pariwisata menyumbang seperempat dari GDP (*Growth Domestic Product*). Pada tahun 2010, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 34,4% dari GDP. Sementara menurut data Kementerian Pariwisata yang didapat dari Biro Statistika Nasional, pada tahun 2014, sektor pariwisata menyumbang 25,2% terhadap GDP dengan pertumbuhan 2,6%. Sementara angka tersebut terus mengalami penurunan hingga 2018. Pada tahun 2018, sektor pariwisata menyumbang 24,5% terhadap GDP yang mana berjumlah lebih dari tujuh belas ribu rufiyaa. Dalam hal ini, menurut data Kementerian Pariwisata biaya yang dikeluarkan wisatawan di Maladewa adalah 2,9 biliun dolar pada tahun 2018. Angka tersebut mengalami peningkatan hingga hampir 10% dari tahun 2017 (Ministry of Tourism of Republic of Maldives, 2019).

Selanjutnya, pariwisata di Maladewa yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara juga memengaruhi perpolitikan di Maladewa. Kebijakan luar negerinya yang berorientasi kepada pariwisata tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa stabilitas di bidang pariwisata. Penurunan jumlah pengunjung/wisatawan juga berdampak kepada politik di Maladewa, di mana penurunan jumlah pengunjung menghambat terlaksananya berbagai kebijakan yang kemudian akan berdampak kepada perencanaan lainnya di pemerintahan. Selain itu, permasalahan dalam lapangan kerja di bidang pariwisata dapat mendorong peningkatan pengangguran. Hal ini dapat mengarah kepada kriminalitas yang mendorong instabilitas politik di Maladewa. Terutama dengan peran penting pariwisata di sektor tersier yang menyerap banyak tenaga kerja (Kundur, 2012). Tentu, pariwisata memberikan pengaruh penting terhadap stabilitas politik di Maladewa.

Ketergantungan Kepulauan Bahama pada Sektor Pariwisata

Pariwisata telah menjadi sumber pemasukan yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi negara-negara kecil yang sedang berkembang. Berdasarkan laporan PBB, bahwa ada sekitar 58 negara kecil yang memiliki ketergantungan besar pada sektor pariwisata. Kepulauan Bahama juga menjadi salah satunya. Negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari tiga ratus ribu jiwa tersebut termasuk destinasi wisata negara kepulauan yang populer. Menurut data dari UNWTO, jumlah kedatangan internasional ke Bahama sekitar satu juta enam ratus ribu pengunjung, yang jumlahnya empat kali lipat dari jumlah warga lokal. Angka ini sangat luar biasa mengingat promosi Bahama hanyalah wisata alam dengan layanan serta fasilitas *resort* hingga hotel berbintang, bukan negara industri dengan gemerlap malam. Dengan besarnya antusiasme pengunjung internasional maupun lokal, pariwisata berkontribusi besar terhadap GDP, yakni sekitar 40%. Dengan kontribusi 40% terhadap GDP, maka dapat dikatakan bahwa hampir setengah dari perekonomian ditopang oleh sektor pariwisata.

Belum lagi jumlah serapan tenaga kerja yang hampir setengah dari populasi Bahama, yakni 48,4%. Maka, dapat dilihat bahwa masyarakat maupun negara bersinergi dalam membangun pariwisata dan juga bergantung kepada sektor tersebut (Hampton & Jeyacheya, 2020).

Akan tetapi, meskipun masyarakat mendapatkan pekerjaan melalui pembukaan lapangan kerja di sektor pariwisata, namun keuntungan yang didapat tidak sepadan dengan besarnya upaya yang dikeluarkan oleh Bahama. Pengembangan pariwisata tidak memberikan dampak merata terhadap seluruh bidang dalam sektor pariwisata baik atraksi pariwisata yang dikelola perusahaan besar maupun lokal. Ketergantungan yang tinggi pada pariwisata mendorong kebutuhan untuk selalu meningkatkan infrastruktur dan layanan wisata, sehingga Kepulauan Bahama harus terbuka dengan masuknya para investor asing ke dalam negerinya.

Dengan demikian, pembangunan hotel-hotel berbintang hingga atraksi wisata mewah menjadi tujuan utama para wisatawan. Promosi besar-besaran dari wisata mewah milik perusahaan besar tidak memberikan ruang bagi usaha kecil seperti *homestay*. Sehingga pemerataan peningkatan kesejahteraan tidak terjadi di Bahama. Menurut data, Bahama mengalami *economy leakage* dengan persentase sekitar 85%. Angka ini sangat tinggi, sehingga dapat dilihat bahwa perkembangan pariwisata memang masif tetapi tidak memberikan kesejahteraan secara merata pada masyarakat kecil. Padahal ketergantungan pada sektor pariwisata sangatlah tinggi. Oleh karena itu, pengembangan *sustainable tourism*, promosi *homestay* hingga *guesthouse* menjadi prioritas pemerintah Bahama. Selain itu, para pakar juga menyarankan untuk mengembangkan usaha-usaha kecil penyedia kelengkapan wisata serta konsep *blue economy* mengingat potensi wisata bahari yang luar biasa (Hampton & Jeyacheya, 2020; Russell, 2020).

DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA MALADEWA DAN KEPULAUAN BAHAMA

Dampak Covid-19 pada Ekonomi

Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada multi-sektor, baik di bidang ekonomi maupun politik. Dari kontraksi ekonomi, resesi hingga kebijakan yang bergeser pada fokus utama yakni sanitasi dan Dari kontraksi ekonomi, resesi hingga kebijakan yang bergeser pada fokus utama yakni sanitasi dan *hygiene*. Seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan yang serupa. Akan tetapi, negara-negara kepulauan yang bergantung pada sektor pariwisata sebagai pemasukan utamanya, mengalami kesulitan dalam memulihkan ekonominya. Dua negara tersebut yang dilanda dampak negatif dengan cukup masif yakni Maladewa dan Kepulauan Bahama.

Dampak pandemi di Maladewa di awal penyebarannya sudah cukup membatalkan berbagai kebijakan pengembangan pariwisata di sana. Target kunjungan wisata yang ditetapkan untuk tahun 2020 adalah 2,5 juta wisatawan, namun semua kebijakan tersebut dibatalkan karena Pandemi Covid-19. Pembatasan diberlakukan di negara tersebut. Dengan pembatasan, maka Maladewa akan kehilangan wisatawan selama pandemi yang mana diperkirakan 50% dari jumlah normal. Bahkan pembatalan *travel booking* telah berjumlah sekitar 161 ribu pembatalan. Dengan demikian, sektor pariwisata mengalami penurunan performa. Hal ini memberi dampak masif kepada perekonomian negara, yakni penurunan GDP (*Gross Domestic Product*). Selanjutnya,

dampak negatif memberikan efek domino kepada sektor ketenagakerjaan. Sekitar 16% tenaga kerja mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sementara 35% tenaga kerja memilih untuk bertahan pada pekerjaannya dengan bayaran rendah. Kemudian 49% tenaga kerja bertahan pada pekerjaannya tanpa dibayar. Hal ini berdampak terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat. Bahkan beberapa perusahaan hingga industri perhotelan memberhentikan pekerja hingga sebelas ribu pekerja. Hal ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat kecil dan rumah tangga (Ranjan, 2020; UNDP & Ministry of Economic Development of Republic of Maldives, 2020).

Sementara dampak pandemi di Kepulauan Bahama cukup buruk disebabkan kondisi sebelumnya yang sudah tidak baik akibat Topan Dorian. Hal ini berdampak pada ekonomi Bahama yang berkontraksi menjadi -0,6% setelah dilanda Topan Dorian juga pandemi. Selain itu, dampak pandemi yang juga melanda Amerika Serikat sebagai salah satu negara penopang ekonomi Bahama mendorong krisis ekonomi melanda negara kepulauan di Karibia ini. Bahkan neraca pembayarannya mengalami defisit hingga -3,38%. Hal ini berdampak pada penurunan performa pariwisata dan impor. Kunjungan juga menurun hingga 59,7% dari normal. Bahkan pariwisata kapal pesiar hanya berkontribusi 10% pada target pariwisata, yang mana sebelumnya menjadi atraksi wisata paling diminati.

Dengan penurunan performa pariwisata akibat lemahnya perekonomian, maka tingkat pengangguran akan naik. Diperkirakan sekitar lebih dari 30 ribu orang dikeluarkan atau keluar dari pekerjaannya. Angka ini, hanya menunjukkan orang-orang yang bekerja untuk perusahaan formal. Sementara orang-orang yang bekerja secara *self-employment* sebenarnya juga menjadi pengangguran. Sehingga persentase pengangguran akan lebih besar dari data proyeksi pemerintah. Bahkan perdana menteri Bahama mengatakan akan mencapai 30% dari total pekerja sebelum pandemi. Dengan persentase yang hampir sepertiga tersebut, maka akan berdampak kepada penurunan kesejahteraan masyarakat yang juga memengaruhi konsumsi dan daya beli. Dengan demikian, efek domino yang diberikan oleh pandemi memengaruhi seluruh sektor di Kepulauan Bahama, bahkan sektor terkecil seperti manajemen rumah tangga (Khadan et al., 2020; Mera, 2020).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pandemi Covid-19 memberikan pukulan hebat di bidang ekonomi maupun politik, terutama pada negara kepulauan yang mengandalkan satu sektor ekonomi yakni pariwisata. Ketergantungan terhadap pariwisata menyebabkan Bahama maupun Maladewa kesulitan menangani kondisi pembatasan mobilisasi selama masa pandemi. Dengan kata lain, pemasukan sektor pariwisata yang mengalami penurunan mendorong terciptanya instabilitas ekonomi, seperti menurunnya GDP hingga pemberlakuan PHK.

Dampak Covid-19 pada Politik

Pandemi memberikan dampak kepada perpolitikan negara. Hal ini berlaku pula bagi negara kepulauan, yakni Maladewa dan Kepulauan Bahama. Pandemi memberikan dampak kepada perekonomian yang juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di sebuah negara. Fokus pengambilan kebijakan juga didorong untuk mempertimbangkan unsur kesehatan dalam setiap langkahnya. Hal ini dijadikan sarana untuk mencegah penyebaran lebih luas dari Covid-19. Sehingga dalam hal ini, baik

Maladewa maupun Kepulauan Bahama memutar arah kebijakannya dengan orientasi baru kepada pariwisata yang aman dan terjaga sanitasi serta *hygiene*-nya.

Maladewa sendiri mengalami perubahan arah kebijakan yang awalnya berpusat kepada sektor pariwisata, bergeser kepada kesehatan dan ketahanan ekonomi. Kebijakan yang diambil sebagai langkah penanganan dampak pandemi yakni dengan mengerahkan berbagai perangkat negara, mulai dari Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Layanan Sosial. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengumumkan situasi darurat pada awal Maret 2020. Selanjutnya, pemerintah juga menyediakan laboratorium khusus untuk tes berbagai sampel guna mendukung pencegahan penyebaran virus.

Berbagai sektor diminta untuk menerapkan *social distancing*, baik di hotel ataupun *guesthouse*. Pemerintah juga bekerjasama dengan berbagai klinik untuk menyediakan layanan gratis untuk *screening* hingga perawatan pasien Covid-19. Bahkan pemerintah membentuk satuan khusus untuk penanganan pandemi, *Covid-19 Task Force*, dibawah Otoritas Manajemen Bencana Nasional (*National Disaster Management Authority*). Selanjutnya, pemerintah juga berusaha untuk memulihkan sektor ekonomi kelas bawah di kalangan masyarakat. Pemerintah memberikan subsidi listrik sebesar 30-40% bagi masyarakat dan juga subsidi sebesar 169 juta dolar pada perusahaan yang masih bertahan dan mempekerjakan pekerjanya seperti sebelumnya (Asian Development Bank, 2020).

Sementara itu, Kepulauan Bahama merespon pandemi dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan pendekatan pada sektor ekonomi dan kesehatan. Ada empat bidang yang menjadi fokus utama dari kebijakan pemerintah Bahama, yaitu sektor kesehatan dan keamanan, ekonomi fiskal, sosial serta finansial. Pada sektor kesehatan dan keamanan, pemerintah Bahama menyokong dana bagi pelaksanaan serangkaian prosedural penanganan Covid-19, seperti deteksi orang terjangkit, isolasi hingga perawatan. Selain itu, pemerintah juga membangun pusat penelitian atau laboratorium khusus untuk bencana kemanusiaan ini. Di sisi lain, pemerintah juga meminta swalayan dan pasar untuk memberikan jam khusus bagi para lansia untuk berbelanja, sehingga mengurangi kontak karena mereka sangat rentan terhadap penyakit tersebut.

Selanjutnya, berbagai tempat publik juga diwajibkan menyediakan layanan sanitasi seperti *handsanitizer* juga pengukur suhu tubuh. Pemerintah juga membatasi mobilisasi dalam negeri. Sementara pada sektor ekonomi fiskal, pemerintah memfokuskan seluruh pendanaan untuk penanganan pandemi. Bahkan menarik pajak dari perusahaan-perusahaan untuk membantu pendanaan serta memotong berbagai anggaran yang dianggap tidak krusial. Adapun pemerintah juga menyediakan dana sebesar sekitar 1,8 juta dolar untuk mendukung perekonomian masyarakat di *family-islands*. Selanjutnya pada sektor sosial, pemerintah menyediakan bantuan makanan dan dukungan bagi para pekerja yang diberhentikan, memberikan dana bantuan melalui *National Insurance Board* serta menyediakan kupon gratis makan di sekolah dan kesempatan pelatihan untuk pengembangan sumber daya. Kemudian untuk membantu sektor finansial, pemerintah mengalokasikan pinjaman lunak sebesar 20 juta dolar bagi UMKM di Bahama (Khadan et al., 2020).

Kedua negara kepulauan mengalami perubahan arah kebijakan akibat pandemi. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran pemerintah akibat dampak ekonomi yang besar di kedua negara tersebut. Perhatian pemerintah yang beralih pada sektor sosial-

politik serta kesehatan mengindikasikan adanya permasalahan yang muncul pada sektor tersebut. Dengan kata lain, instabilitas politik terjadi di kedua negara akibat pandemi. Di sisi lain, instabilitas politik tersebut menyebabkan pengalihan prioritas kebijakan menuju sektor kesehatan dan sosial-politik, alih-alih pariwisata. Hal ini menunjukkan adanya guncangan politik yang terjadi pada para pengambil kebijakan di Maladewa maupun Bahama akibat adanya pandemi.

KESIMPULAN

Negara-negara kepulauan seperti Maladewa dan Kepulauan Bahama memiliki ketergantungan besar terhadap pariwisata. Dalam hal ini, pariwisata mengambil sekitar 25% dari perekonomian Maladewa dan 40% dari perekonomian di Kepulauan Bahama. Sehingga pariwisata memberi pemasukan besar terhadap masyarakat kecil, pengusaha besar hingga perputaran ekonomi di pemerintahan. Maka, kondisi terbatas dengan ruang gerak yang sempit mendorong melemahnya sektor pariwisata di masa pandemi. Oleh karena itu, negara-negara kepulauan yang hanya menjual daya tarik alam dan bergantung pada pariwisata mengalami kontraksi ekonomi yang hebat serta perubahan arah politik karena terhambatnya berbagai kebijakan akibat munculnya instabilitas. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dampak pandemi yang melemahkan pariwisata mendorong instabilitas ekonomi-politik di negara-negara kepulauan, seperti Maladewa dan Kepulauan Bahama.

REFERENCES

- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Jurnal Analisis Isi*, 5(9), 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Andrianto, T., & Sugijama, G. (2016). The Analysis of Potential 4A's Tourism Component in the Selasari Rural Tourism, Pangandaran, West Java. *Proceedings of the Asia Tourism Forum. 2016 - the 12th Biennial Conference of Hospitality and Tourism Industry in Asia*, 138–144. <https://doi.org/10.2991/atf-16.2016.21>
- Asian Development Bank. (2015). *Maldives: Overcoming The Challenges of A Small Island State (Country Diagnostic Study)*. <https://www.adb.org/publications/maldives-overcoming-challenges-small-island-state>
- Asian Development Bank. (2020). *Coronavirus Disease Impact and Responses in Maldives*. <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/LD4CoronavirusImpactResponseMaldives.pdf>
- Auvray, B. (2010). Tourism in the Maldives: experiencing the difference from the Maldives. *Tourism & Seductions of Difference*, 1–11. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00536400>
- Baldacchino, G. (2006). Warm versus Cold Water Island Tourism: A Review of Policy Implications. *Island Studies Journal*, 1(2), 183–200. <https://doi.org/10.24043/isj.193>
- Baldacchino, G. (2016). *Archipelago tourism: policies and practices* (1st ed.). Routledge.
- Baldacchino, G., & Ferreira, E. C. D. (2013). Competing Notions of Diversity in Archipelago Tourism: Transport Logistics, Official Rhetoric and Inter-Island Rivalry

- in the Azores. *Island Studies Journal*, 8(1), 84–104. <https://doi.org/10.24043/isj.278>
- Bello, O., Fonted de Meira, L., Gonzales, C., Peralta, L., Skerette, N., Marcano, B., Patin, M., Vivas, G., Espiga, C., Allen, E., Ruiz, E., Ibarra, F., Espiga, F., Gonzalez, M., Marconi, S., Carrera, D., Nelson, M., Chakalall, Y., Perroni, A., ... Mason, M. (2020). *Assessment of the Effects and Impacts of Hurricane Dorian in the Bahamas*. <https://doi.org/10.18235/0002582>
- Carroll, J., Farmer, E., & Saa, S. (2016). Tourism Planning in the Northern Bahamas. *Journal of Tourism Insights*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.9707/2328-0824.1060>
- Erislan. (2016). Tourism Attraction and the Uniqueness of Resources on Tourist Destination in West Java, Indonesia. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 5(1), 251–266. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3150481>
- González-Sánchez, C., Muñoz-Salinas, F., & Roset Calzada, J. (2012). Tourism trends in the Caribbean. *6th Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU): TOURBANISM*, 1–10. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/12283/C_67_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2020). Tourism-Dependent Small Islands, Inclusive Growth, and the Blue Economy. *One Earth*, 2(1), 8–10. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2019.12.017>
- Hasyaimi, M. A. (2016). Analisis Perubahan Keputusan Pemerintah Maladewa Terhadap Kontrak Konsesi Bandara Internasional Male Dari Perusahaan GMR India Ke BUCG Tiongkok Pada Tahun 2010-2014. *Global and Policy Journal of International Relations*, 4(2), 83–100. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/1919>
- Henderson, J. C. (2008). The politics of tourism: A perspective from the Maldives. *TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism*, 3(1), 99–115. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/25378>
- Hendrickson, M., & Skerette, N. (2020). *Industrial upgrading and diversification to address competitiveness challenges in the Caribbean: The case of tourism* (No. 85; ECLAC: Studies and Perspectives Series – The Caribbean). <https://www.cepal.org/en/publications/45099-industrial-upgrading-and-diversification-address-competitiveness-challenges>
- Holden, A., & Fennell, D. A. (2012). *The Routledge handbook of tourism and the environment*. Routledge.
- Khadan, J., Smets, L., Mooney, H., Giles Álvarez, L., Castellani, F., Gauto, V., & Rosenblatt, D. (2020). *The Impact of COVID-19 on The Economies of The Region (Caribbean)*. <https://doi.org/10.18235/0002282>
- Khotimah, K., & Wilopo, W. (2017). Strategi pengembangan destinasi pariwisata budaya (Studi kasus pada kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 42(1), 56–65. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1657>
- Kundur, S. K. (2012). Development of tourism in maldives. *International Journal of Scientific and Research Publication*, 2(4), 1–5.

- Laingsingh, S. S. (2020). *The Maldives as a Culturally Hybrid Tourism Destination: A Multimodal Discourse Analysis on the Branding of the Maldives for Western Backpackers and Luxury Tourists* [Radboud University]. <https://theses.uhn.ru.nl/handle/123456789/10175?locale-attribute=en>
- Lee, C.-F. (2014). An Investigation of Factors Determining the Study Abroad Destination Choice. *Journal of Studies in International Education*, 18(4), 362–381. <https://doi.org/10.1177/1028315313497061>
- Manhas, P. S., Manrai, L. A., & Manrai, A. K. (2016). Role of tourist destination development in building its brand image: A conceptual model. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 21(40), 25–29. <https://doi.org/10.1016/j.jefas.2016.01.001>
- MATI. (n.d.). *Maldives Association Of Tourism Industry*. <https://mati.mv/>
- Mera, M. (2020). *The Bahamas Country Note: Impact of COVID-19 and policy options* (Policy Document Series). <https://www.undp.org/latin-america/publications/bahamas-country-note-impact-covid-19-and-policy-options>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications Sage UK: London, England.
- Ministry of Tourism & Civil Aviation of Maldives. (2011). *Maldives Third Tourism Master Plan (TTMP) 2007-2011*. <https://www.tourism.gov.mv/dms/document/f9b34ac5042ced2ad4770595731c113b.pdf>
- Ministry of Tourism of Bahamas. (2021). *Islands Vacation*. Official Website of The Bahamas. <https://www.bahamas.com/>
- Ministry of Tourism of Republic of Maldives. (2019). *Tourism Yearbook 2019*.
- Ministry of Tourism Republic of Maldives. (2021). *Updates on the Covid-19 Situation in the Maldives*. <https://www.tourism.gov.mv/covid19>
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48. <https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571>
- MTDC. (2021). *Corporate Information*. <http://www.mtdc.com.mv/en/corporate-information/>
- Nowacki, M. (2013). *The Determinants of Satisfaction of Tourist Attractions' Visitors*. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/the_determinants/the_determinants.pdf
- Palmer, C., & Bolderston, A. (2006). A Brief Introduction to Qualitative Research. *Canadian Journal of Medical Radiation Technology*, 37(1), 16–19. [https://doi.org/10.1016/S0820-5930\(09\)60112-2](https://doi.org/10.1016/S0820-5930(09)60112-2)
- Rahardjo, M. (2018). *Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://repository.uin-malang.ac.id/2480/>
- Ranjan, A. (2020). COVID-19: Economic Impact and Challenges for the Maldives. *ISAS-Insights*, 616, Article 616. <https://www.isas.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/05/ISAS-Insights-No.-616.pdf>

- Rasheeda, F. (2012). *Integrating culture and heritage into the tourism product of the Maldives*. [KDI School]. <https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/30396>
- Razak, A., & Suprihardjo, R. (2013). Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu di Kepulauan Seribu. *Jurnal Teknik ITS*, 2(1), C14–C19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v2i1.2461>
- Russell, C. D. (2020). *Addressing Leakages between the Tourism Hotel Sector and Other Sectors in The Bahamas* [Walden University]. <https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/9638/>
- Sangadji, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. CV Andi Offset.
- Seixas, B. V., Smith, N., & Mitton, C. (2017). The Qualitative Descriptive Approach in International Comparative Studies: Using Online Qualitative Surveys. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(9), 778–781. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.142>
- TDC. (n.d.). *Repositioning The Islands Of The Bahamas: A National Tourism Development Strategy 2017-2022*. [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Bahamas Updated Nationally Determined Contribution.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Bahamas%20Updated%20Nationally%20Determined%20Contribution.pdf)
- TDC. (2021). *About Us: Tourism Development Corporation*. <https://www.tdcbahamas.com/about-us/>
- The Government of Bahamas. (2021). *COVID 19 Travel Requirements*. The Islands of The Bahamas. <https://www.bahama.com/travelupdates>
- Thomas, A. (2016). Small tourism enterprises, mass tourism and land use change: A case study of The Bahamas. *Caribbean Geography*, 21, 24–44. https://www.researchgate.net/publication/317972091_Small_tourism_enterprises_mass_tourism_and_land_use_change_A_case_study_of_The_Bahamas
- UNDP, & Ministry of Economic Development of Republic of Maldives. (2020). *Impact of the COVID-19 Crisis in the Maldives*. <https://maldives.un.org/en/114115-impact-covid-19-crisis-maldives>
- Wright, A. (2018). *Development Challenges in The Bahamas*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0001152>
- Zubair, F. N. I., & Bouchon, F. (2014). Maldives as a Backpacker's Destination: Supply and Demand Perspectives. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 144, 256–263. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.294>